

**LAPORAN PENELITIAN**

**PEMANTAUAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA  
DI MEDIA LUAR RUANG DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**TAHUN 2019**



Disusun oleh:

Siti Raudloh (Ketua)  
Toni Samsul Hidayat (Anggota)

**KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT  
BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
MATARAM, 2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PEMANTAUAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA  
DI MEDIA LUAR RUANG DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
TAHUN 2019**

Disusun oleh:

Siti Raudloh (Ketua)

Toni Samsul Hidayat (Anggota)

Penelitian ini telah diperiksa dan disahkan oleh

Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat

Mataram, 11 Agustus 2019



Umri Kulsum, S.S., M.Hum.

NIP 197301161997032001

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur kami panjatkan atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga laporan penelitian Pemantauan Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Luar Ruang di Kabupaten Sumbawa Barat dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Penelitian ini merupakan lanjutan dari serangkaian kegiatan penelitian kelompok Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat tahun 2019. Keberhasilan dalam penyelesaian penelitian ini tidak akan lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu menyelesaikan penelitian ini. Secara khusus peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, Kepala SMAN 1 Taliwang, Kepala SMKN 1 Taliwang, Kepala SDN 1 Taliwang, SLBN Taliwang, SKPD Kabupaten Sumbawa Barat, dan BUMD Kabupaten Sumbawa Barat yang telah membantu tim peneliti dalam pengumpulan data. Tak lupa ucapan terima kasih kepada anggota tim peneliti yang sama-sama menyelesaikan penelitian ini.

Harapan kami, semoga penelitian ini mempunyai nilai guna dan manfaat bagi pembangunan bangsa dan negara terutama dalam bidang pembinaan dan pengembangan bahasa.

Mataram, Agustus 2019

Tim Peneliti

**DAFTAR ISI**

Halaman

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Tinjauan Pustaka.....	3
1.6 Sasaran.....	5
1.7 Landasan Teoretis.....	6
1.7.1 Teori Pengutamakan Penggunaan Bahasa Negara di Ruang Publik.....	6
1.7 Metode Penelitian.....	12
1.7.1 Populasi dan Sampel.....	12
1.7.2 Metode Pengumpulan Data.....	14
1.7.3 Metode Analisis Data.....	15
1.7.4 Teknik Penyajian Hasil Analisis Data.....	16
1.8 Pelaksanaan Kegiatan.....	16
<b>BAB II GAMBARAN DAERAH PENGAMATAN</b> .....	18
2.1 Letak Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik.....	17
2.2 Potensi Sumber Daya Alam.....	20
2.3 Penduduk dan Tenaga Kerja.....	23
2.4 Perekonomian.....	24
2.5 Infrastruktur.....	25
2.6 Rencana Pembangunan.....	27
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	29
3.1 Penggunaan Bahasa Ruang Publik di Kabupaten Sumbawa Barat.....	29
3.2 Deskripsi Hasil Penilaian Pemantauan Media Luar Ruang di KSB.....	35
3.3 Kendala.....	35
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	36



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Deskripsi Instrumen Penilaian Pengutamaan Penggunaan Bahasa di Ruang Publik .....	8
Tabel 2 Peringkat Keterkendalian .....	11
Tabel 3 Daftar Lembaga Objek Penelitian .....	13
Tabel 4 Jumlah Data Media Luar Ruang .....	14
Tabel 5 Kodifikasi Data .....	15
Tabel 6 Penilaian Data .....	15
Tabel 7 Luas Wilayah Daratan Menurut Kecamatan .....	19
Tabel 8 Rekapitulasi Nilai Ruang Publik Kabupaten Sumbawa Barat 2019 .....	29
Tabel 9 Grafik Persentase Nilai Ruang Publik Kabupaten Sumbawa Barat 2019 .....	30
Tabel 9 10 Hasil Penilaian Pemantauan Media Luar Ruang di KSB .....	35

## Abstrak

### Kajian penggunaan bahasa Indonesia pada media luar ruang di Kabupaten Sumbawa Barat

ini bertujuan untuk memantau pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Kajian ini digunakan sebagai acuan atau tolok ukur dalam menentukan kebijakan pemakaian bahasa sehingga kebijakan tersebut dapat berpihak pada langkah pemertabatan bahasa Indonesia. Data yang digunakan dalam kajian ini berupa papan nama lembaga dan gedung, sarana umum, produk barang/jasa, nama jabatan, penunjuk arah atau rambu umum dan tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi sejenis lainnya pada lembaga pemerintah, swasta/BUMD, dan pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat. Data diperoleh dengan memfoto media luar ruang yang kemudian ditranskripsi dan dianalisis.

Model analisis yang digunakan adalah analisis kebahasaan berupa instrumen penilaian yang menggunakan tiga variabel a. kaidah kebahasaan meliputi ejaan, pilihan kata, dan struktur; b. fisik kebahasaan; posisi, ukuran huruf, dan warna huruf; dan c. tipografi kebahasaan; desain, dan kejelasan. Hasil kegiatan pemantauan menunjukkan penggunaan bahasa pada ranah ruang publik di Kabupaten Sumbawa Barat termasuk dalam kategori terkendali C dengan nilai berjumlah 1.906. Nilai tersebut berada pada rentangan 1.800—2.200. Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya kurang terkendali secara fisik didominasi bahasa asing; mulai lebih banyak berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang mulai baik.

Kata kunci: Media luar ruang, pemantauan, pengendalian, ruang publik.

## **BABI PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu kegiatan Kantor Bahasa NTB sebagai unit kerja Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah adalah melakukan kajian penggunaan bahasa Indonesia pada media luar ruang.

Kajian tersebut dimaksudkan guna melakukan tugas dan fungsi Kantor Bahasa NTB untuk mengkaji sejauh mana pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Kegiatan

tersebut juga dilakukan sebagai salah satu amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Pada

Bab III Bahasa Negara pasal 36 ayat (3) menyebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman,

perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau

badan hukum Indonesia; ayat (4) menyebutkan bahwa penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila

memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan. Lebih jauh, pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu

umum penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum dan ayat (2) menyebutkan bahwa penggunaan bahasa

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing. Pada Bab III bagian kedua tentang penggunaan bahasa Indonesia pasal

26 dijelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan; kemudian pada pasal 27 menjelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib

digunakan dalam dokumen resmi negara; dan pasal 34 menjelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perorangan kepada

instansi pemerintah.

Daerah yang menjadi pengamatan adalah Kabupaten Sumbawa Barat. Daerah tersebut memperlihatkan fenomena media luar ruang yang begitu beragam terutama di

pusat-pusat kota di mana terdapat pusat-pusat bisnis dan perbelanjaan. Masyarakat tidak hanya disuguhkan dengan berbagai macam barang dan tempat berbelanja tetapi

juga disuguhkan dengan berbagai informasi yang disampaikan melalui papan nama, reklame, spanduk, dan berbagai jenis media luar ruang lainnya. Tidak sedikit informasi yang disampaikan tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia bahkan disampaikan dalam bahasa asing dan daerah. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009, penggunaan bahasa asing ataupun bahasa daerah tidak dilarang pada penulisan papan nama, rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, reklame, dan spanduk tetapi harus mengutamakan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, penulisannya menggunakan bahasa Indonesia dan dapat diikuti oleh bahasa asing dan bahasa daerah.

Pengaturan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan lingua franca bagi berbagai etnis dengan bahasa yang berbeda di Indonesia tidak lain karena ruang publik (*public space*) bukanlah ruang privat melainkan ruang yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan arena bagi masyarakat untuk berinteraksi (Jurgen Habermas dalam Kadarsih, 2008: 1). Ruang publik tidak membatasi siapa yang dapat mengunjunginya sehingga siapa saja dapat menikmati fasilitas umum yang ada tersebut. Ruang publik tidak memberikan akses kepada etnis tertentu, tetapi memberikan keluasan bagi siapa saja yang mau menikmati fasilitas yang ada di sana. Ruang publik merupakan tempat interaksi yang bersifat umum. Dengan demikian, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan lingua franca bagi etnis dengan bahasa yang berbeda wajib hadir dan diutamakan karena hanya bahasa Indonesia yang secara hukum diakui dan dapat dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Ada tiga hal yang menjadi pusat perhatian pengutamaan bahasa negara di ruang publik, fisik kebahasaan meliputi kaidah kebahasaan, fisik kebahasaan dan tipografi kebahasaan. Berkaitan dengan Pemantauan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik, Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat melakukan kegiatan tersebut sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Untuk itu perlu dilakukan kajian-kajian pemantauan penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang demi terwujudnya bahasa Indonesia yang bermartabat di negeri sendiri sebagaimana disebutkan di atas sesuai amanat Undang-undang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, masalah utama yang menjadi topik kajian dalam penelitian penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang di Kabupaten Sumbawa Barat adalah.

- 1) Mendeskripsikan jenis kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang di Nusa Tenggara Barat.
- 2) Menjabarkan keterkendalian pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik di Kabupaten Sumbawa Barat.

## **1.3 Tujuan**

Tujuan kajian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Mengetahui jenis kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang di Kabupaten Sumbawa Barat.
- 2) Untuk mengetahui kategori keterkendalian pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik di Kabupaten Sumbawa Barat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dalam kajian pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik di Kabupaten Sumbawa Barat.

Manfaat lain kajian ini diharapkan sebagai pengembangan bahan penelitian selanjutnya bagi Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat dan peneliti lanjutan dalam kajian pemantauan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik di Kabupaten Sumbawa Barat. Selain itu, kajian ini juga diharapkan bermanfaat bagi pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Kajian terhadap penggunaan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik pernah dilakukan oleh para peneliti atau akademisi. Kajian-kajian tersebut juga telah dipublikasikan pada jurnal ataupun seminar-seminar. Beberapa kajian yang dimaksud secara ringkas disampaikan dalam penelitian ini sebagai referensi dan pijakan berpikir.

Kajian tersebut antara lain dilakukan Sri Indrawati (2008) dengan judul "Penggunaan Bahasa Indonesia pada Informasi Layanan Umum dan Layanan Niaga, Sudah Benarkah?"; Ratna Susanti dengan judul "Analisis Kesalahan Berbahasa pada Penulisan Media Luar Ruang di Kota Klaten"; Noviandy (2014) dengan judul "Persepsi Masyarakat tentang Penggunaan Iklan Media Luar Ruang terhadap Estetika Kota Samarinda"; kajian pemantauan penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang di Surakarta yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2012); dan pemantauan penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima yang dilakukan oleh Kantor Bahasa NTB (2007-2008).

Indrawati (2008: 3) menjelaskan bahwa konsekuensi kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang dapat menimbulkan konsekuensi bagi para pemakai bahasa dan kegamangan perkembangan bahasa Indonesia pada masa yang akan datang. Dalam kajiannya, Indrawati menemukan penulisan menggunakan bahasa daerah dan asing serta kesalahan penulisan.

Kajian yang dilakukan oleh Susanti menemukan masih banyaknya kesalahan penulisan bahasa di media luar ruang di Kota Klaten. Kesalahan yang dimaksud adalah belum atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dia juga memberikan contoh kesalahan yang ditemukan, yaitu penulisan tanda baca, penulisan singkatan, kesalahan penggunaan huruf kapital, kesalahan pemilihan kata, dan kesalahan ejaan.

Noviandy (2014: 417) melakukan kajian persepsi masyarakat Kota Samarinda terhadap penggunaan iklan di media luar ruang. Noviandy (2014: 429) menemukan bahwa masyarakat Kota Samarinda tidak menyukai kondisi iklan media luar ruang dan tidak menyukai ketidakteraturan penggunaan media luar ruang karena dapat merusak pemandangan.

Pemantauan penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang di Surakarta yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menemukan adanya penulisan nama jalan menggunakan aksara Jawa termasuk nama perusahaan; penggunaan bahasa asing pada papan nama; penulisan ejaan yang tidak tepat.

Pemantauan penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang di NTB yang dilakukan oleh Tim Kantor Bahasa Provinsi NTB menemukan kesalahan penggunaan

bahasa Indonesia pada tataran ejaan, penggunaan tanda baca, dan struktur tulisan yang dipengaruhi oleh bahasa asing dan daerah.

Dengan kata lain, penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang masih tidak mengikuti aturan sesuai dengan norma yang dijelaskan dalam UU No. 24 Tahun 2009. Kesalahan-kesalahan yang dimaksud mencakup penulisan menggunakan bahasa asing dan daerah, kesalahan penggunaan ejaan, pemilihan kata, dan struktur yang dipengaruhi oleh bahasa asing dan daerah.

Penelitian terkait yang pernah dibiayai oleh Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat yang dilakukan oleh Husnan dkk. 2017. Dengan topik kajian dalam penelitian “Pengguna bahasa Indonesia di media luar ruang dan dokumen resmi daerah di Nusa Tenggara Barat.” Adapun hasil kajian tersebut yaitu sikap bahasa pengusaha atau pelaku bisnis dan kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang yang menunjukkan hasil yang memuaskan. Penggunaan bahasa di dua ranah pada masing-masing daerah masuk dalam kelompok sangat baik. Meskipun begitu, Kota Bima menduduki peringkat teratas diikuti oleh Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Barat.

## 1.6 Sasaran

Sasaran utama kajian penggunaan dan pengutamakan bahasa negara di ruang publik di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut.

- 1) Tulisan nama lembaga dan gedung, objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada nama lembaga berbadan hukum Indonesia dan nama gedung utama yang terpampang di ruang publik.
- 2) Tulisan nama sarana umum, objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada sarana (tempat parkir, ruang tunggu, kantin, dan lain-lain) yang dapat dipakai oleh masyarakat umum yang ikut serta melaksanakan fungsi lembaga.
- 3) Tulisan nama ruang pertemuan, objek ini merupakan bahasa yang digunakan dalam penamaan tempat pertemuan yang bersifat umum (nama aula, nama ruang rapat, balai sidang, dan lain-lain).
- 4) Tulisan nama produk barang/jasa, objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada nama atau label tertulis untuk produk barang/jasa khas yang dihasilkan lembaga (nama jasadoga, bahan publikasi, nama laman, buku, dan lain-lain).

5) Tulisan nama jabatan, objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada nama atau label tertulis untuk jabatan yang tercantum pada tempat atau ruangan kantor lembaga (tulisan jabatan pada meja atau ruangan pimpinan lembaga, dan lain-lain).

6) Tulisan penunjuk arah atau rambu umum, objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada tulisan untuk mengarahkan publik menuju tempat tertentu atau melakukan sesuatu (tulisan masuk, keluar, dilarang parkir, dan lain-lain).

7) Tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi lain sejenisnya, objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada spanduk, kain rentang, slogan, imbauan, moto, atau informasi lain yang diketahui publik (ucapan selamat datang, moto lembaga, baliho, iklan lembaga, dan lain-lain).

### 1.7 Landasan Teoretis

Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah model analisis kebahasaan berupa instrumen berupa variabel dan indikator penilaian yang disusun oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Adapun model instrument penilaian tersebut sebagai berikut.

#### 1.7.1 Teori Pengutamaan Penggunaan Bahasa Negara di Ruang Publik

##### a. Kaidah kebahasaan yang meliputi ejaan, pilihan kata, dan struktur.

Kaidah yang meliputi penilaian ejaan meliputi tiga indikator penilaian

1. Tidak terdapat kesalahan dalam pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur asing/serapan,
2. Terdapat satu atau dua kesalahan dalam pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur asing/serapan, dan
3. Terdapat lebih dari dua kesalahan dalam pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur asing/serapan; hanya menggunakan sistem ejaan.

Kaidah yang meliputi pilihan kata meliputi tiga indikator penilaian

1. Tidak terdapat kesalahan dalam pemilihan kata (tepat, benar, dan lazim) untuk bahasa negara

2. Terdapat kesalahan dalam pemilihan kata (tepat, benar, dan lazim) untuk bahasa negara

3. Hanya menggunakan pilihan kata bahasa asing/bahasa tak resmi (kedaerahan)

Kaidah yang meliputi kaidah struktur kebahasaan meliputi tiga indikator penilaian

1. Tidak terdapat kesalahan dalam pemilihan kata (tepat, benar, dan lazim) untuk bahasa negara

2. Terdapat kesalahan struktur dalam penyusunan frasa/kalimat bahasa negara

3. Hanya menggunakan struktur bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan)

**b. Fisik kebahasaan meliputi posisi, ukuran huruf, dan warna huruf.**

Kaidah yang meliputi variabel posisi meliputi tiga indikator penilaian

1. Hanya menempatkan bahasa negara.

2. Menempatkan bahasa negara di atas/di bawah/berdampingan dengan bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan).

3. Hanya menempatkan bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan).

Kaidah yang meliputi variabel ukuran huruf meliputi tiga indikator penilaian

1. Menggunakan bahasa negara saja (dalam ukuran apa pun); ukuran huruf bahasa negara lebih besar daripada bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan).

2. Membuat ukuran huruf bahasa negara sama dengan bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan).

3. Membuat ukuran huruf bahasa negara lebih kecil daripada bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan); hanya menggunakan bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan) dalam ukuran apa pun.

Kaidah yang meliputi variabel warna huruf meliputi tiga indikator penilaian

1. Menggunakan bahasa negara saja (dalam warna apa pun); warna bahasa negara lebih menonjol daripada bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan).

2. Membuat warna bahasa negara sama dengan warna bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan).

3. Membuat warna bahasa asing lebih mencolok daripada bahasa negara atau hanya menggunakan bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi kedaerahan.

**c. Tipografi kebahasaan meliputi bahan, desain, dan kejelasan.**

Kaidah yang meliputi variabel bahan meliputi tiga indikator penilaian

1. Terbuat dari bahan permanen (kayu, batu, kaca, atau kaca serat)
2. Terbuat dari bahan semipermanen (plastik, kain, atau styrofoam)
3. Terbuat dari bahan tidak permanen (kertas atau sejenisnya)

Kaidah yang meliputi variabel desain meliputi tiga indikator penilaian

1. Terlihat desain yang sangat menarik
2. Terlihat desain yang cukup menarik
3. Terbuat dari bahan tidak permanen (kertas atau sejenisnya)

Kaidah yang meliputi variabel kejelasan meliputi tiga indikator penilaian

1. Terlihat tulisan yang sangat jelas dan proporsional
2. Terlihat tulisan yang kurang jelas dan kurang proporsional
3. Terlihat tulisan yang tidak jelas dan tidak proporsional

**Tabel 1: Deskripsi Instrumen Penilaian Pengutamaan Penggunaan Bahasa di Ruang Publik**

Variabel	Skor	Kriteria
		Fisik Kebahasaan
Posisi	30	Hanya menempatkan bahasa negara
	20	Menempatkan bahasa negara di atas/di bawah/berdampingan dengan bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan)
	10	Hanya menempatkan bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan)

Ukuran huruf	30	Menggunakan bahasa negara saja (dalam ukuran apa pun); ukuran huruf bahasa negara lebih besar daripada bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan)
	20	Membuat ukuran huruf bahasa negara sama dengan bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan)
	10	Membuat ukuran huruf bahasa negara lebih kecil daripada bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan); hanya menggunakan bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan) dalam ukuran apa pun
Warna huruf	30	Menggunakan bahasa negara saja (dalam warna apa pun); warna bahasa negara lebih menonjol daripada bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan)
	20	Membuat warna bahasa negara sama dengan warna bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan)
	10	Membuat warna bahasa asing lebih mencolok daripada bahasa negara atau hanya menggunakan bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi(kedaerahan)
<b>Variabel</b>	<b>Skor</b>	<b>Kaidah Kebahasaan</b>
Ejaan	30	Tidak terdapat kesalahan dalam pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur asing/serapan
	20	Terdapat satu atau dua kesalahan dalam pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur asing/serapan
	10	Terdapat lebih dari dua kesalahan dalam pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur asing/serapan; hanya menggunakan sistem ejaan bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan)
	30	Tidak terdapat kesalahan dalam pemilihan kata (tepat, benar, dan lazim) untuk bahasa negara

Pilihan kata	20	Terdapat kesalahan dalam pemilihan kata (tepat, benar, dan lazim) untuk bahasa negara
	10	Hanya menggunakan pilihan kata bahasa asing/bahasa tak resmi (kedaerahan)
Struktur	30	Tidak terdapat kesalahan struktur dalam penyusunan frasa/kalimat (termasuk yang hanya menggunakan satu kata) bahasa negara
	20	Terdapat kesalahan struktur dalam penyusunan frasa/kalimat bahasa negara
	10	Hanya menggunakan struktur bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan)
<b>Variabel</b>	<b>Skor</b>	<b>Tipografi Kebahasaan</b>
Bahan	30	Terbuat dari bahan permanen (kayu, batu, kaca, atau kaca serat)
	20	Terbuat dari bahan semipermanen (plastik, kain, atau <i>styrofoam</i> )
	10	Terbuat dari bahan tidak permanen (kertas atau sejenisnya)
Desain	30	Terlihat desain yang sangat menarik
	20	Terlihat desain yang cukup menarik
	10	Terlihat desain yang tidak menarik
Kejelasan	30	Terlihat tulisan yang sangat jelas dan proporsional
	20	Terlihat tulisan yang kurang jelas dan kurang proporsional
	10	Terlihat tulisan yang tidak jelas dan tidak proporsional

Nilai akhir penggunaan bahasa di ruang publik diperoleh dari nilai setiap kelompok objek dikalikan dengan bobot 50% untuk variabel fisik kebahasaan, 30% untuk variabel kaidah kebahasaan, dan 20% untuk variabel tipografi kebahasaan.

Nilai akhir tersebut akan menunjukkan tingkat pengutamaan bahasa negara di ruang publik lembaga.

Khusus untuk variabel fisik kebahasaan, setiap indikator diboboti kembali dengan besaran yang disesuaikan, yaitu 60% untuk indikator posisi, 20% untuk

indikator warna huruf, dan 20% untuk indikator ukuran huruf. Pembobotan itu mengacu pada konsep pengutamaan bahasa negara: bobot terbesar diberikan pada variabel fisik kebahasaan. Pada akhirnya, pembobotan itu akan menghasilkan nilai skor maksimal 30 dan minimal 10 untuk setiap data objek yang dinilai.

**Tabel 2: Peringkat Keterkendalian**

bagian II	Rentang	Kebahasaan		
		Fisik	Kaidah	Tipografi
<b>A</b>	2.601—3.000	++	++	++
<b>B</b>	2.201—2.600	+	+	+
<b>C</b>	1.800—2.200	-	+	+
<b>D</b>	1.400—1.799	-	-	-

**Catatan:**

Skor  $\leq 1.399$  dikualifikasi dalam kategori belum terkendali.

Setelah penilaian semua variabel, selanjutnya penilaian keterkendalian terhadap pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Berikut deskripsi peringkat keterkendalian.

**Terkendali A**

Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya sangat terkendali: secara fisik tidak ditemukan bahasa asing; sepenuhnya berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang sangat baik.

**Terkendali B**

Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya cukup terkendali: secara fisik tidak didominasi bahasa asing; jauh lebih banyak berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang makin baik.

**Terkendali C**

Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya kurang terkendali: secara fisik kurang didominasi bahasa asing; mulai lebih banyak berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang mulai baik.

## **Terkendali D**

Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya sangat kurang terkendali: secara fisik masih didominasi bahasa asing; sangat sedikit berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang sangat kurang baik.

### **1.7 Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan bahasa tulis ruang publik pada lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena penelitian dilakukan semata-mata hanya berdasarkan pada fakta yang ada atau fenomena yang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya, sehingga yang dihasilkan atau yang dicatat berupa perian bahasa yang biasa dikatakan sifatnya seperti potret, paparan seperti adanya (Sudaryanto, 1988: 62).

Subjek penelitian ini adalah penggunaan bahasa tulis ruang publik pada lembaga pemerintah, lembaga swasta/BUMD, dan lembaga pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Objek penelitian ini adalah unsur kebahasaan tertulis yang terdapat pada lembaga pemerintah, swasta/BUMD, dan pendidikan. Data penelitian difokuskan kepada tujuh objek yaitu tulisan nama lembaga dan gedung, sarana umum, produk barang/jasa, nama jabatan, penunjuk arah atau rambu umum dan tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi sejenis lainnya pada lembaga pemerintah, swasta/BUMD, dan pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat.

#### **1.7.1 Populasi dan Sampel**

Yang dimaksud populasi dalam penelitian ini adalah kelompok subjek yang harus memiliki ciri-ciri atau karakteristik bersama yang membedakannya dengan kelompok subjek lain. Populasi penelitian ini adalah seluruh media luar ruang yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam penelitian bahasa, sampel yang besar tidak diperlukan karena perilaku linguistik cenderung lebih homogen dibandingkan perilaku-perilaku lainnya (Mahsun, 2005:210). Ahsen (dalam Mahsun, 2005:210) menyebutkan bahwa penelitian sosiolinguistik yang hasilnya telah diterbitkan ternyata menggunakan sampel dalam jumlah yang tidak besar. Sampel yang digunakan dalam

penelitian ini berjumlah tujuh puluh (70) foto media luar ruang dari empat lembaga pemerintah, empat lembaga pendidikan, dan dua lembaga swasta/BUMD di Kabupaten Sumbawa Barat.

**Tabel 3: Daftar Lembaga Objek Penelitian**

No	Nama Lembaga	Keterangan
1	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	
2	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat	
4	Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat	
5	SMAN 1 Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat	
6	SDN 1 Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat	
7	SLBN Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat	
8	SMKN 1 Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat	
9	PLN Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat	
10	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sumbawa Barat	

Objek foto dalam penelitian ini adalah 1) Tulisan nama lembaga dan gedung, objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada nama lembaga berbadan hukum Indonesia dan nama gedung utama yang terpampang di ruang publik. 2) Tulisan nama sarana umum, objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada sarana (tempat parkir, ruang tunggu, kantin, dan lain-lain) yang dapat dipakai oleh masyarakat umum yang ikut serta melaksanakan fungsi lembaga. 3) Tulisan nama ruang pertemuan, objek ini merupakan bahasa yang digunakan dalam penamaan tempat pertemuan yang bersifat umum (nama aula, nama ruang rapat, balai sidang, dan lain-lain). 4) Tulisan nama produk barang/jasa, objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada nama atau label tertulis untuk produk barang/jasa khas yang dihasilkan lembaga (nama jasaboga, bahan publikasi, nama laman, buku, dan lain-lain). 5) Tulisan nama jabatan, objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada nama atau label tertulis untuk

jabatan yang tercantum pada tempat atau ruangan kantor lembaga (tuliskan jabatan pada meja atau ruangan pimpinan lembaga, dan lain-lain). 6) Tulisan penunjuk arah atau rambu umum, objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada tulisan untuk mengarahkan publik menuju tempat tertentu atau melakukan sesuatu (tuliskan masuk, keluar, dilarang parkir, dan lain-lain). 7) Tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi lain sejenisnya, objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada spanduk, kain rentang, slogan, imbauan, moto, atau informasi lain yang diketahui publik (ucapan selamat datang, moto lembaga, baliho, iklan lembaga, dan lain-lain).

Rincian objek kajian ruang publik yang dijadikan sebagai sampel penelitian yakni sebagai berikut.

- a. Media ruang publik yang ada di instansi pemerintah empat lembaga sejumlah 28 objek foto.
- b. Media ruang publik yang ada di lembaga pendidikan empat lembaga sejumlah 28 objek foto.
- c. Media ruang publik yang ada di lembaga swasta dua lembaga sejumlah 14 objek foto.

### 1.7.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam pemantauan penggunaan bahasa di ruang publik dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu: (a) mengumpulkan data penggunaan bahasa di ruang publik dari sepuluh lembaga di Kabupaten Sumbawa, (b) memilih tujuh buah data yang mewakili tujuh objek pengutamaan bahasa negara dengan ketentuan nama lembaga dan gedung sebanyak satu data, nama sarana umum sebanyak satu data, nama ruang pertemuan sebanyak satu data, nama produk barang/jasa sebanyak satu data, nama jabatan satu data, petunjuk arah atau rambu umum, dan spanduk atau alat informasi lainnya sebanyak satu data. Data yang diperlukan berjumlah tujuh puluh data dari sepuluh lembaga penggunaan bahasa di ruang publik.

**Tabel 4: Jumlah Data Media Luar Ruang**

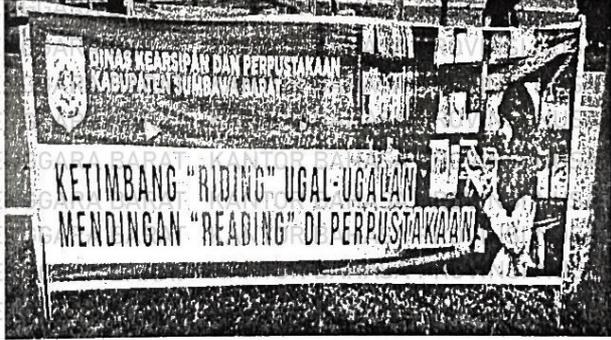
No	Kelompok Objek	Jumlah Data	Keterangan
1	Lembaga dan Gedung	10	
2	Sarana Umum	10	

3	Ruang Pertemuan	10
4	Nama Jabatan	10
5	Produk Barang/Jasa	10
6	Penunjuk atau Rambu Umum	10
7	Spanduk/Alat Informasi Layanan	10
	<b>Jumlah</b>	<b>70</b>

### 1.7.3 Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara (a) mengodifikasi seratus data sesuai petunjuk kodifikasi, (b) menilai data sesuai dengan kaidah penilaian yang ditentukan, dan (3) memasukkan data ke dalam tabel hingga menghasilkan peringkat keterkendalian.

**Tabel 5: Kodifikasi Data**

Objek	Data	Kodifikasi
1 Lembaga dan Gedung		18—KSB—01
7. Spanduk/Alat Informasi Layanan		18—KSB—64

**Tabel 6:Penilaian Data**

No	Kode Objek	Kaidah Kebahasaan (30%)			Fisik Kebahasaan (50%)			Tipografi Kebahasaan (20%)			Jumlah
		Ejaan	Pilihan kata	Struktur	Posisi (60%)	Ukuran huruf (20%)	Warna huruf (20%)	Bahan	Desain	Kejelasan	
1	18—KSB—01	30	30	30	30	30	30	30	30	30	270
2	18—KSB—02	20	30	30	30	30	30	30	30	30	260
3	18—KSB—03	30	30	30	30	30	30	30	30	30	270

#### 1.7.4 Teknik Penyajian Analisis Data

Hasil dalam penelitian ini disampaikan dalam dua sub bab, yaitu hasil analisis foto media luar ruang. Subbab pertama disampaikan dalam bentuk persentase dan analisis kualitatif kesalahan penggunaan bahasa di media luar ruang. Subbab kedua disampaikan menggunakan tabel hitung atau bagan dan deskripsi.

#### 1.8 Pelaksanaan Kegiatan

##### 1. Tahapan

Kegiatan Pemantauan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

##### a) Persiapan

Tahap persiapan, tim pelaksana mengadakan koordinasi dengan kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, untuk menentukan wilayah Pemantauan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.

##### b) Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan tim melakukan pendokumentasian Pemantauan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik berdasarkan instrumen yang diarahkan oleh Badan Bahasa. Selanjutnya, tim melakukan tabulasi dan penilaian terhadap obyek-obyek kegiatan Pemantauan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik yang telah diperoleh.

##### c) Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan tahap akhir dari kegiatan ini, yaitu menyerahkan laporan hasil kegiatan Pemantauan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik, baik kepada Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat dan Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan.

## **2. Waktu, Tempat, dan Pelaksana**

### **a) Waktu**

Kegiatan Pemantauan Pemertabatan Bahasa Indonesia di Ruang Publik ini dilakukan pada bulan Maret 2019.

### **b) Tempat**

Tempat kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa Barat.

### **c) Pelaksana**

Tim pelaksana kegiatan ditunjuk berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat Nomor 0219/G5.21/KP/2019 Tanggal 27 Februari 2019.

## BAB II

### GAMBARAN DAERAH PENGAMATAN

#### 2.1 Letak Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik

##### A. Letak Geografis dan Administratif

Kabupaten Sumbawa Barat sebagai salah satu daerah dari sepuluh kabupaten/kota yang berada pada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak di ujung barat Pulau Sumbawa pada posisi 116°42' sampai dengan 117°05' Bujur Timur dan 08°08' sampai dengan 09°07' Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Batu Lanteh dan Kecamatan Lunyuk Kab. Sumbawa.
- Sebelah Barat : Selat Alas
- Sebelah Utara : Alas Barat dan Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa.
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Luas Kabupaten Sumbawa Barat sekitar 1.849,02km<sup>2</sup>, dengan ketinggian antara 0-1.730 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Sumbawa Barat memiliki 16 pulau kecil, seluruhnya sudah bernama. Sebagian besar wilayah Sumbawa Barat (93.102 ha atau 50,53 persen) merupakan daerah dengan topografi sangat curam atau memiliki kemiringan lahan diatas 40%.

Wilayah Administrasi Kabupaten Sumbawa Barat telah dimekarkan menjadi delapan Kecamatan, yakni Kecamatan Poto Tano dengan Luas 15,888 ha yang terdiri atas enam desa/desa persiapan, Kecamatan Seteluk dengan luas wilayah 23.621 ha yang terdiri atas tujuh desa, Kecamatan Brang Rea dengan Luas mencapai 21.207 ha yang terdiri atas empat desa, Kemudian Kecamatan Brang Ene dengan luas wilayah 14.090 ha yang terdiri atas lima desa, Kecamatan Taliwang sebagai Ibu Kota Kabupaten memiliki luas wilayah 37.593 ha yang terdiri atas enam Kelurahan dan tujuh desa, selanjutnya Kecamatan Jereweh memiliki luas 26.019 ha yang terdiri atas empat desa, Kecamatan Maluk dengan luas wilayah 9.242 ha yang terdiri atas lima desa dan Kecamatan Sekongkang yang terletak di ujung Selatan Kab. Sumbawa Barat memiliki luas wilayah 37.242 ha yang terdiri atas enam desa.

**Tabel 7: Luas Wilayah Daratan menurut Kecamatan**

No.	Kecamatan	Luas(ha)	Luas(%)	Jumlah Desa/ Kelurahan
1.	Poto Tano	15.888	8,59	8
2.	Seteluk	23.621	12,77	10
3.	Brang Rea	21.207	11,47	9
4.	Brang Ene	14.090	7,62	6
5.	Taliwang	37.593	20,33	8/6
6.	Jereweh	26.019	14,07	4
7.	Maluk	9.242	5,00	5
8.	Sekongkang	37.242	20,14	7
	<b>T o t a l</b>	<b>184.902</b>	<b>100,00</b>	<b>57/6</b>

### B. Topografi

Keadaan Topografi wilayah Kabupaten Sumbawa Barat cukup beragam, mulai dari datar, bergelombang curam sampai sangat curam dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 1.730 mdpl, meliputi datar seluas 21.822 hektar (11,80%), bergelombang seluas 16.369 hektar (8,83%), curam seluas 53.609 hektar (28,999%), dan sangat curam seluas 93.102 hektar (50,35%) ketinggian untuk kota-kota kecamatan di KSB berkisar antara 10 sampai 650 mdpl.

Topografi semakin datar sebagian besar digunakan untuk kegiatan pertanian dan lokasi permukiman, sedang topografi semakin curam merupakan kawasan hutan yang berfungsi untuk melindungi kawasan sekitarnya yang lebih rendah. Tingginya persentase luas tanah yang termasuk dalam klasifikasi curam di Kabupaten Sumbawa Barat menyebabkan persentase wilayah yang dapat digunakan sebagai lahan produktif terutama untuk pertanian menjadi relatif sedikit dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Sumbawa Barat itu sendiri.

### C. Hidrologi dan Klimatologi

Perairan laut di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang utama adalah selat alas dengan beberapa teluk kecil disekitarnya seperti Teluk Taliwang, Teluk Balat, Teluk Maluk, Teluk Tawar dan lain-lain. Perairan Selat Alas menghubungkan dua wilayah perairan yang mempunyai karakteristik yang berbeda, yaitu Laut Flores di bagian utara dan Samudera Hindia di bagian Selatan. Dengan demikian Selat Alas

mempunyai arti penting karena peranannya dalam proses Arus Lintas Indonesia (ARLINDO), sehingga merupakan wilayah perairan dengan potensi perikanan yang cukup besar.

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan wilayah yang beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan berlangsung dari bulan November sampai Maret (lima bulan), sedang musim kemarau dari bulan April sampai Oktober (tujuh bulan). Total hari hujan tahun 2004 sebanyak 95 hari dengan rata-rata per bulan 7,92 hari, sedang total curah hujan sebesar 2.156 mm atau rata-rata per bulan 179,66 mm. Disamping hujan sumber air di Kabupaten Sumbawa Barat berupa sungai, mata air, danau dan waduk. Sebagian besar sungai mempunyai Daerah Tangkapan Sungai (DPS) yang kecil dan mengering pada musim kemarau, untuk mengatasi kekurangan air dan ketergantungan pertanian terhadap musim penghujan telah dibangun sejumlah bendungan atas partisipasi perusahaan swasta yang beroperasi disekitar daerah tersebut.

## 2.2 Potensi Sumberdaya Alam

### A. Pertanian

Secara umum produksi tanaman bahan makanan di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Komiditi kedelai adalah satu-satunya komoditi yang mengalami penurunan produksi. Produksi kedelai mengalami penurunan 21,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertanian merupakan sektor ekonomi strategis di Sumbawa Barat, walaupun nilai tambah yang dihasilkan tidak sebesar sektor pertambangan, namun penyerapan tenaga kerja pada sektor ini tertinggi dibandingkan sektor lainnya (33,32 persen/Sakernas 2010, Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik tahun 2010 produksi padi mencapai 71.386 ton, mengalami kenaikan mencapai 16.84 persen jika dibandingkan produksi tahun 2009. Produksi padi tahun 2010 merupakan yang tertinggi pada periode 2006-2010, sedangkan produksi terendah terjadi pada tahun 2007.

Disisi lain produktifitas padi mengalami penurunan dari 46,77 kw/ha pada tahun 2006 menjadi 45,35 kw/ha tahun 2010. Penurunan produktifitas padi ini

disebabkan karena terjadi kekeringan dimana pada saat tanam padi terjadi limit air sedangkan pada saat menjelang panen terjadi hujan yang cukup deras.

## **B. Peternakan**

Bentang geografis yang berbukit dengan banyak padang rumput menjadikan wilayah Sumbawa Barat sangat ideal untuk mengembangkan sektor peternakan. Sapi dan kerbau adalah ternak yang paling banyak diusahakan. Sebagian besar ternak yang dipelihara di Sumbawa barat tidak dikandangan. Pada tahun 2014 jumlah sapi di kabupaten Sumbawa Barat tercatat sebanyak 61.128 ekor dan kerbau sebanyak 13.846 ekor. Adapun ternak lain yang diusahakan adalah kuda, kambing dan domba. Jumlah unggas di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, peningkatan yang signifikan terjadi pada komoditi ayam ras.

## **C. Perikanan**

Secara Geografis Kabupaten Sumbawa Barat berbatasan langsung dengan laut dengan Panjang garis pantai 167,8 km dan luas perairan mencapai 11.234,07 km<sup>2</sup>, Kabupaten Sumbawa Barat memiliki potensi perairan yang cukup besar untuk pengembangan sektor perikanan.

Produksi perikanan tangkap pada tahun 2014 mengalami penurunan dari 2.779,40 ton pada tahun 2013 menjadi 2.661,84 Selain perikanan tangkap, budidaya perikanan juga sangat potensial dikembangkan di wilayah Sumbawa Barat.

## **D. Perkebunan**

Kelapa dan jambu mete masih menjadi komoditi perkebunan utama yang dikembangkan di Sumbawa Barat. Pada tahun 2013 produksi kelapa dan jambu mete mengalami peningkatan. Produksi kelapa meningkat 2,96 persen dari 1.084 ton pada tahun 2012 menjadi 1.116 ton pada tahun 2013, sedangkan produksi jambu mete meningkat hingga 31,81 persen dari tahun sebelumnya.

Selain Kelapa dan jambu mete masyarakat Sumbawa barat juga mengusahakan tanaman perkebunan lainnya. Produksi kopi, asam, aren dan jarak pagar pada tahun 2013 masing-masing sebesar 154,3 , 98,7 , 97,6 , dan 87,58 ton.

Adapun nilai produksi komoditi perkebunan lainnya relatif kecil.

## **E. Kehutanan**

Hutan di Kabupaten Sumbawa Barat memiliki luas sekitar 125.335,8 Ha dimana 51,33 persen diantaranya merupakan hutan lindung dan sisanya terdiri dari hutan produksi, hutan konservasi dan lain-lain.

## **F. Daerah Wisata Pantai**

### **1. Pantai Maluk**

Bulir pasir lebih besar dari pantai lain. Tersedia berbagai penginapan dengan beragam tarif. Bila dari Taliwang, alat transportasi yang digunakan bisa menyewa motor atau mobil. Jarak tempuh kurang lebih satu jam.

### **2. Pantai Kertasari**

Bagi traveler jalur ke pantai Kertasari sangat cocok. Pasalnya, jalan sangat beragam. Dari beraspal hingga berbatu. Transportasi yang digunakan bisa dengan motor atau mobil. Selain itu, anda juga bisa bercengkrama dengan petani rumput laut. Atau barang kali anda berminat untuk berbisnis rumput laut. Atau sekedar membelinya untuk buah tangan. Jika mau menginap, ada resort Wales & Wafes. Tarifnya cukup terjangkau.

### **3. Pantai Balat**

Cukup mudah menuju ke pantai Balat. Bisa ditempuh dengan mobil dan motor. Cukup 15 menit. Untuk tidur anda bebas memilih penginapan yang berdiri sepanjang pantai Balat.

### **4. Pantai Benete**

Untuk menuju pantai Benete sangat mudah. Karena satu arah dengan pantai Maluk. Kedua pantai ini berdekatan. Soal penginapan jangan khawatir. Anda bisa memilihnya dengan sangat bebas, sangat banyak. Kendaraannya bisa menggunakan motor dan mobil, bisa juga dengan bersepeda. Jarak tempuh kurang lebih satu jam.

### **5. Pantai Sekongkang**

Dipantai ini sangat cocok bagi peselancar karena ombaknya sangat besar. Transportasi yang digunakan bisa dengan motor atau mobil. Dengan jarak tempuh satu jam lebih karena satu arah dengan pantai Benete dan Maluk.

## **6. Pantai Jelenga**

Untuk sampai pantai Jelenga, bisa menggunakan kendaraan motor dan mobil, bisa juga dengan bersepeda. Jarak tempuh kurang lebih satu jam. Bila pada musimnya, pantai Jelenga sangat cocok bagi olahragawan selancar. Bahkan kerap dilombakan.

## **2.3 Penduduk dan Tenaga Kerja**

### **A. Penduduk**

Berdasarkan Proyeksi Hasil Sensus Penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Sumbawa Barat tahun 2014 tercatat 129.724 jiwa. Dilihat dari komposisi gender, jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan dengan sex ratio mencapai 103 atau dengan kata lain setiap 100 orang perempuan terdapat 103 orang laki-laki.

Jika dikelompokkan menurut usia maka dapat dilihat bahwa penduduk Sumbawa Barat didominasi oleh penduduk usia muda dimana penduduk usia produktif lebih banyak dibanding penduduk lansia. Meskipun demikian penduduk muda dengan umur 15 tahun juga relatif besar.

Dilihat dari persebarannya penduduk Sumbawa Barat masih terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Taliwang yang merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan. Kepadatan penduduk di wilayah ini tercatat mencapai 132 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2014.

### **B. Tenaga Kerja**

Berdasarkan data SP 2010, penduduk usia kerja (berumur 15 tahun ke atas) di Sumbawa Barat terdapat sekitar 85.902 orang atau 74,73 persen dari total penduduk. Dari seluruh penduduk usia kerja tersebut 66,44 persen diantaranya termasuk angkatan kerja sedangkan 33,56 persen sisanya termasuk bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang tidak melakukan aktifitas ekonomi baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya.

Tahun 2010 angkatan kerja yang bekerja mencapai 93,46 persen, dengan proporsi pekerja laki-laki sebanyak 65,61 persen dan pekerja perempuan 34,39 persen. Berdasarkan jenis kelamin, pengangguran dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada perempuan dengan persentase masing-masing sebesar 54,17 persen

dan 45,83 persen. Menurut tempat tinggal, lebih dari 73,39 persen penduduk yang menganggur bertempat tinggal di daerah perdesaan.

Secara umum pada tahun 2010 sebagian besar pekerja di Sumbawa Barat bekerja pada sektor pertanian dengan persentase lebih dari 34 persen dan lebih dari 82 persen mereka yang bekerja disektor pertanian bertempat tinggal di daerah perdesaan.

Dari sisi tingkat pendidikan, mayoritas (78,21 persen) pekerja di sektor pertanian mempunyai pendidikan SD kebawah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 meningkat dari tahun sebelumnya. TPAK Kabupaten Sumbawa barat tahun 2014 mencapai 69,02 persen, meningkatnya TPAK juga diiringi dengan menurunnya tingkat pengangguran dari 6,91 persen menjadi 5,71 persen pada tahun 2014. Dilihat dari sektor usahanya sektor pertanian masih menjadi sektor terbesar penyerap tenaga kerja yang mencapai 39,34 persen. Jika dilihat dari status pekerjaannya mayoritas penduduk Sumbawa Barat berusaha sendiri, angkatan kerja yang berusaha sendiri mencapai 47,14 persen, buruh/karyawan/pegawai sebesar 25,77 persen, pekerja bebas sebesar 8,66 pesen dan pekerja keluarga sebesar 18,44 persen.

#### **2.4 Perekonomian.**

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Sumbawa Barat berada pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan kategori Pertambangan dan Penggalian, hal ini terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori ini terhadap pembentukan PDRB Sumbawa Barat. Sumbangan terbesar dari tahun 2010 hingga 2014 dihasilkan oleh kategori Pertambangan dan Penggalian. Keadaan ini menggambarkan betapa berpengaruhnya aktivitas pertambangan terhadap perekonomian di Kabupaten Sumbawa Barat. Meskipun Peranan dari Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan hanya sebesar 6,9 persen, namun berdasarkan data sakernas 2013 yang dipublikasikan oleh BPS, sebesar 38,11 persen Penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja di Kabupaten Sumbawa Barat menggantungkan kehidupannya pada kategori ini.

Sementara itu, peranan kategori lainnya masih berada di bawah enam persen. Jika ditelaah dari tahun ke tahun, peranan kategori pertambangan dan penggalian semakin menurun. Pada tahun 2010 peranan kategori pertambangan dan penggalian

mencapai 91,1 persen, sedangkan tahun 2014 hanya sebesar 72,2 persen  
Perekonomian Sumbawa Barat pada selama tahun 2011 hingga 2014 berfluktuatif.

Laju pertumbuhan PDRB Sumbawa Barat tahun 2011 mengalami penurunan  
hingga mencapai - 2,82 persen, sedangkan tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar  
3,7 persen. Akan tetapi pada tahun 2014 kembali berkontraksi sebesar 0,64 persen.  
Apabila diamati pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat sejalan dan searah  
dengan pertumbuhan kategori pertambangan dan penggalian. Adapun untuk kategori-  
kategori lainnya berturut-turut selama lima tahun terakhir hampir semuanya mencatat  
pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2014 kategori-kategori mengalami tumbuh  
yang positif selain kategori pertambangan dan penggalian dan kategori jasa  
perusahaan. Kategori jasa perusahaan mengalami kontraksi 0,1 persen.

## **2.5 Infrastruktur**

### **A. Jalan**

Salah satu bagian dari pembangunan sektor transportasi adalah penyediaan  
jalan. Jalan merupakan komponen utama dalam transportasi darat, disamping sarana  
pendukung lainnya. Ketersediaan jalan akan mampu memperlancar distribusi barang  
dan jasa, sekaligus dapat memperpendek rantai distribusi dari produsen di pedesaan  
ke konsumen. Untuk memperlancar pembangunan pemerintah Kabupaten Sumbawa  
Barat senantiasa berusaha meningkatkan jumlah sarana transportasi seperti jalan.  
Pembangunan jalan menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, Provinsi dan  
Kabupaten/Kota sesuai status jalan masing-masing. Dari total panjang jalan yang ada  
di Kabupaten Sumbawa Barat sebagian besar merupakan jalan kabupaten. Hingga  
tahun 2010 Sumbawa Barat telah membangun jalan kabupaten mencapai 270,60 km.  
Panjang jalan di Sumbawa Barat mengalami kenaikan secara signifikan, panjang jalan  
tahun 2010 bertambah sekitar 41,25 persen dari panjang jalan tahun 2008 yang  
tercatat sepanjang 195,82 km.

Tahun 2010, dari total jalan yang ada 57,74 persen dalam kondisi baik, 14,46  
persen kondisi sedang dan 27,79 persen kondisi rusak. Dibandingkan dengan tahun  
2009 jalan yang berkondisi baik sebesar 67,16 persen, 9,23 kondisi sedang, dan hanya  
23,61 kondisi rusak. Dapat disimpulkan bahwa tahun 2010 terjadi penurunan kondisi

jalan kabupaten. Menurut jenis permukaannya, hanya sepertiga jalan kabupaten yang sudah diaspal, selebihnya masih berupa kerikil dan tanah.

## **B. Kelistrikan**

Listrik adalah sumber energi yang paling vital bagi rakyat Indonesia, karena merupakan sumber energi utama yang digunakan di negara ini. Bahkan, salah satu tolok-ukur dasar bagi kemajuan suatu wilayah adalah terjangkau atau tidaknya wilayah itu oleh jaringan listrik. Listrik digunakan oleh masyarakat untuk banyak hal, baik dalam kapasitasnya sebagai kebutuhan rumah tangga, maupun untuk usaha perekonomian.

Di Kabupaten Sumbawa Barat, secara total terdapat 112 pembangkit listrik yang beroperasi, yang terdiri dari dua buah Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan 110 buah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). PLTS dikelola oleh pihak swasta untuk mengatasi persoalan listrik bagi wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan listrik. Potensi listrik yang dihasilkan sekitar 21.337.029 Kwh, dengan jangkauan pelayanan mencapai 22,343 Kepala Keluarga, namun seperti yang diuraikan diatas masih ada beberapa keluarga yang belum menikmati layanan listrik PLN terutama di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan.

## **C. Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi**

Kabupaten Sumbawa Barat berada pada jalur wisata yang menguntungkan. Kabupaten Sumbawa Barat berada ditengah-tengah daerah tujuan wisata internasional, yaitu Bali dan Lombok di sebelah Barat, Sulawesi dengan Tanah Torajanya di sebelah Utara dan Pulau Komodo di sebelah Timur. Di samping posisi yang strategis Kabupaten Sumbawa Barat juga memiliki keindahan alam terutama pantai yang tidak kalah dengan pantai di pulau Bali dan Lombok. Dengan semua keuntungan yang dimiliki tadi kegiatan pariwisata di Kabupaten Sumbawa Barat diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan pembangunan yang dapat diandalkan, dengan pemasukan devisa yang cukup memadai.

Untuk menunjang kegiatan pariwisata tersebut dibutuhkan akomodasi dan sarana transportasi ke daerah wisata. Sarana akomodasi yang vital bagi pengembangan daerah wisata adalah Hotel/Losmen. Jumlah hotel/losmen di

Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 17 buah, sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Taliwang dan Kecamatan Maluk.

Sarana pos dan telekomunikasi merupakan jendela menuju dunia luar. Dalam era globalisasi, yang ditandai dengan tingginya arus komunikasi, ketersediaan sarana pos dan komunikasi menjadi vital. Di Kabupaten Sumbawa Barat tercatat ada empat kantor pos dan 14 Warnet, 44 Menara Telekomunikasi. Dari total warung komunikasi yang ada, sebagian besar masih terkonsentrasi di Kecamatan Taliwang.

Sarana dan prasarana perhubungan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan. Segala bentuk lalu lintas barang dan manusia sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan. Kelancaran proses pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana pembangunan.

Kabupaten Sumbawa Barat memiliki jenis sarana transportasi umum yaitu transportasi darat dan laut. Transportasi darat dan laut adalah transportasi utama di Sumbawa Barat. Tercatat ada dua terminal dan dua pelabuhan laut di Kabupaten Sumbawa Barat.

## 2.6 Rencana Pengembangan

Pembangunan berbasis RT (Rukun Tetangga) adalah pembangunan yang meletakkan wilayah (lokus) pembangunan di tingkat lingkungan sebagai basis utama pembangunan. Masyarakat RT yang merupakan unit komunitas terkecil (*grass root*) sebagai basis, sekaligus pelaku utama pembangunan dalam mencapai kesejahteraan sosial masyarakat. Program Pembangunan Berbasis Rumah Tangga (PBRT) adalah sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Orang Susah (SIOS), berupa pendataan warga di lingkungan RT, pemetaan dan pendataan warga miskin, penyediaan informasi dan data warga miskin dan lainnya.
2. Pemberdayaan masyarakat antara lain meliputi: pemberdayaan ekonomi, seperti program banuan usaha bagi warga miskin, pemberdayaan politik seperti peningkatan kesadaran dan swadaya politik warga, pemberdayaan sosial budaya, seperti pengembangan potensi kearifan lokal dan lainnya.

3. Peningkatan partisipasi (peran serta) masyarakat antara lain melalui; pelaksanaan dan pengembangan musyawarah Rencana Pembangunan RT (Musrenbang RT), pendampingan warga, pelatihan-pelatihan, dan lainnya.

4. Penongkatan pelayanan dasar seperti bidang kesehatan yakni juru pantau masyarakat, kebersihan lingkungan dan pendidikan, seperti bantuan pendidikan bagi warga miskin dan lainnya.

Secara umum tujuan dari PBRT adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat, tujuan lainnya adalah;

1. Meningkatkan dan memperluas peran serta masyarakat dalam proses pembangunan
2. Mendorong pembangunan dan penganggaran lebih terarah pada rakyat miskin
3. Meningkatkan ketersediaan data, informasi dan pelayanan pembangunan hingga tingkat paling bawah (RT)
4. Mendorong keterlibatan seluruh pelaku pamangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan
5. Mendorong efisiensi dan efektifitas penganggaran daerah, dan
6. Mempercepat pertumbuhan (akselerasi) pembangunan.

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Penggunaan Bahasa Ruang Publik di Kabupaten Sumbawa Barat

Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan ditemukan bahwa ruang publik di Kabupaten Sumbawa Barat terdapat kesalahan tentang ejaan, diksi, dan kalimat. Kesalahan ejaan yang ditemukan terkait tentang penggunaan tanda baca, penulisan huruf, dan penulisan unsur asing/serapan. Sementara itu, kesalahan diksi ruang publik di Kabupaten Sumbawa Barat ditemukan adanya penggunaan bahasa daerah, bahasa asing, dan bahkan bahasa campuran. Bahasa campuran yang digunakan berupa campuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing, dan campuran bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Berkaitan dengan penggunaan bahasa asing dan bahasa daerah diruang publik yang ditemukan peneliti, papan nama lembaga pemerintah di Kabupaten Sumbawa Barat menempatkan bahasa asing yaitu bahasa Inggris di atas bahasa Indonesia. Kesalahan kalimat terjadi karena adanya kesalahan struktur yang digunakan.

Dilihat dari papan nama ruang publik lembaga pemerintah, swasta/BUMD, dan pendidikan yang ditemukan, masing-masing papan nama mempunyai tipografi kebahasaan dan fisik kebahasaan yang berbeda-beda. Dari segi tipografi, papan nama yang digunakan ada yang terbuat dari besi aluminium, kayu, kaca, plastik, kain, dan kertas. Papan nama yang paling dominan terbuat dari bahan besi aluminium dan kayu.

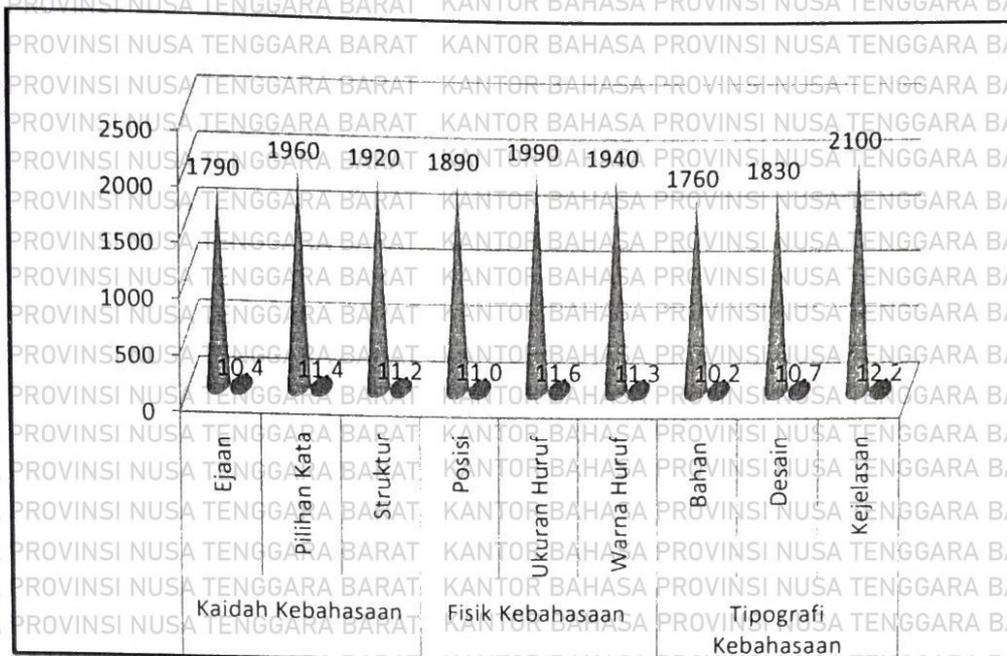
Berikut rekapitulasi dan tabel nilai hasil penggunaan bahasa ruang publik di Kabupaten Sumbawa Barat.

**Tabel 8: Rekapitulasi Nilai Ruang Publik Kabupaten Sumbawa Barat 2019**

Variabel	Nilai	
	Jumlah	Persentase
Kaidah Kebahasaan	Ejaan	1790 10,4 %
	Pilihan Kata	1960 11,4 %
	Struktur	1920 11,2 %
Fisik Kebahasaan	Posisi	1890 11,0%
	Ukuran Huruf	1990 11,6 %
	Warna Huruf	1940 11,3%

<b>Tipografi Kebahasaan</b>	<b>Bahan</b>	1760	10,2 %
	<b>Desain</b>	1830	10,7 %
	<b>Kejelasan</b>	2100	12,2%
<b>Jumlah</b>		<b>17180</b>	<b>100%</b>

**Tabel 9: Grafik Persentase Nilai Ruang Publik di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019**



Berdasarkan rekapitulasi dan tabel di atas, tampak bahwa penggunaan bahasa, dari segi kaidah kebahasaan, ejaan pada papan nama lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan hanya sebanyak 10,4% yang sesuai dengan kaidah yang ditentukan. Sementara itu, sebanyak 11,4% menunjukkan pemilihan diksi yang tepat, dan sebanyak 11,2% yang kalimatnya sudah sesuai dengan struktur kalimat bahasa Indonesia.

Penggunaan ejaan di ruang publik yang nilainya hanya 10,4% menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang memperhatikan bagaimana penulisan ejaan yang benar sesuai dengan kaidahnya. Ada beberapa alasan yang menyebabkan nilai pada aspek ejaan masih rendah. Alasan yang pertama karena faktor ketidaktahuan masyarakat terkait penggunaan ejaan di ruang publik atau minimnya pengetahuan masyarakat tentang ejaan. Alasan kedua karena faktor kesengajaan, maksudnya masyarakat mengetahui bagaimana seharusnya penulisan yang tepatnya sesuai kaidah

PUEBI tetapi mereka tidak peduli yang penting dapat dibaca dan maksudnya sampai kepada pembaca. Alasan ketiga, karena kesalahan ketika mencetak. Hal ini berhubungan dengan pihak percetakan, yaitu ketika mencetak hasil tidak sesuai dengan konsep sebelumnya. Alasan yang keempat yaitu, karena seni dan keindahan untuk menarik minat pembacanya biasanya masyarakat menuliskan nama lembaga atau nama produk barang di papan nama ruang publik dengan tulisan yang bervariasi (bercampur antara huruf kecil dengan kapital, bercampur antara huruf dengan angka dan lain sebagainya).

Untuk menguatkan argumen di atas, berikut contoh penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik baik lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, maupun lembaga swasta/BUMD di Kabupaten Sumbawa Barat.

#### a. Papan nama lembaga Pendidikan



Penggunaan bahasa Indonesia pada papan nama lembaga pendidikan itu kurang tepat pada ejaan. Penulisan huruf kapital semua untuk nama instansi/lembaga/tempat papan nama sudah tepat karena menunjukkan keselarasan.

Penulisannya, yaitu "PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT" dan "SMAN 1 TALIWANG" yang ditulis menggunakan huruf kapital semua.

Penulisan yang terdiri atas satu kata disarankan ditulis lengkap, yaitu 'jl.' menjadi 'jalan'. Penulisan singkatan 'No.' Yang merupakan kepanjangan

"Nomor" untuk singkatan 'Nomor' dan "Telp" untuk singkatan telepon sudah benar.

Namun sebaiknya, kata 'Nomor' dan 'telepon' yang terdiri atas satu suku kata ditulis lengkap 'telepon' yang diikuti tanda titik dua tepat dibelakang huruf terakhir. Dalam

*PUEBI* dijelaskan bahwa tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan.

Kesalahan ejaan yang lain terletak pada penulisan tanda baca. Seharusnya, penulisan alamat pada papan nama itu menggunakan tanda baca koma (,) untuk memisahkan bagian-bagian alamat, yaitu "JALAN TELAGA BIRU NOMOR 1, TELEPON (0372) 81211 TALIWANG, SUMBAWA BARAT". Sesuai dengan kaidah *PUEBI*, tanda koma dipakai di antara (i) nama dan alamat, (ii) bagian-bagian alamat, (iii) tempat dan tanggal, dan (iv) nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan.

#### b. Papan Nama Sarana Umum



Penulisan papan sarana layanan umum di salah satu lembaga pemerintah di Kabupaten Sumbawa tersebut menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Asing. Penggunaan bahasa asing "welcome to" tidak tepat karena lembaga pemerintah ini melayani masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dan berada di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat seharusnya lebih mengutamakan bahasa negara Indonesia, yaitu "Selamat Datang di".

#### c. Papan Nama Ruang Pertemuan



Penulisan papan nama ruang pertemuan di Grand Royal Taliwang Hotel tersebut masih kurang tepat karena hanya menggunakan bahasa asing tanpa ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Seharusnya menggunakan bahasa Indonesia.

#### d. Papan Nama Jabatan



Kesalahan penggunaan bahasa Indonesia pada nama jabatan di atas adalah kesalahan penggunaan tanda titik pada singkatan NIP. Singkatan NIP diketik menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan titik dan diikuti dengan nomor tanpa jarak.

#### e. Nama Produk Barang/Jasa



Penggunaan bahasa Indonesia pada salah satu produk makanan dari Kabupaten Sumbawa Barat sudah tepat.

f. **Papan Penunjuk atau Rambu Umum**



Penggunaan bahasa Indonesia pada papan penunjuk sudah tepat. Penulisan huruf kapital semua juga sudah tepat karena menunjukkan keselarasan.

g. **Spanduk/Alat Informasi Layanan**



Penulisan huruf kapital semua pada spanduk di atas sudah tepat karena menunjukkan keselarasan, namun pemilihan kata menggunakan bahasa campuran, yaitu bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Pemilihan leksikon yang bermuatan lokal dan asing menjadi pilihan karena dianggap dapat membangun relasi keakraban dan memberikan komitmen yang dapat dipercayai oleh masyarakat. Bahasa daerah dipergunakan di ruang publik dengan asumsi bahwa bahasa daerah memiliki nilai emotif dan persuasif yang dapat menarik simpati masyarakat, sedangkan bahasa asing dapat menarik perhatian kaum milenial.

### 3.2 Deskripsi Hasil Penilaian Pemantauan Media Luar Ruang di KSB

Hasil kegiatan Pemantauan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik di Kabupaten Sumbawa Barat.

**Tabel 10: Hasil Penilaian Pemantauan Media Luar Ruang di KSB**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Objek	Total Nilai	Kualifikasi, Terkendali			
				2.601 3.000 A	2.201 2.600 B	1.800 2.200 C	1.400 1.799 D
1	Sumbawa Barat	100	1906			v	

Berdasarkan hasil analisis foto-foto pemantauan pengutamaan bahasa negara di ruang publik di Kabupaten Sumbawa Barat maka dapat dideskripsikan, bahwa Kabupaten Sumbawa Barat mendapatkan nilai 1.906. Nilai tersebut berada pada rentangan 1.800—2.200, yaitu kategori terkendali C. Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya kurang terkendali; secara fisik kurang didominasi bahasa asing; mulai lebih banyak berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang mulai baik.

### 3.3 Kendala

Kegiatan Pemantauan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019 ini tentu saja tidak lepas dari beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain karena kurang kooperatifnya beberapa lembaga khususnya lembaga swasta/BUMD yang dikunjungi sehingga data yang diminta kurang memadai.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas disimpulkan bahwa penggunaan bahasa pada media luar ruang di Kabupaten Sumbawa Barat terdiri atas (1) penggunaan bahasa Indonesia (2) campuran bahasa Indonesia dan asing, dan (3) bahasa Indonesia, Asing, dan daerah. Kesalahan penggunaan ejaan masih banyak ditemukan, yaitu penulisan alamat, penulisan tanda baca, dan penggunaan huruf kapital.

Penggunaan bahasa Indonesia pada media luar ruang di Kabupaten Sumbawa Barat termasuk dalam kategori terkendali C dengan nilai berjumlah 1.906. Nilai tersebut berada pada rentangan 1.800—2.200. Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya kurang terkendali: secara fisik didominasi bahasa asing; mulai lebih banyak berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang mulai baik.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan predikat kategori tersebut perlu diadakan lagi pembenahan-pembenahan dengan sosialisasi tentang kebijakan kebahasaan. Untuk itu, Kantor Bahasa NTB dengan kegiatan penyuluhan bahasa yang berpatokan pada UU No. 24 Tahun 2009, Permendikbud No. 46 Tahun 2009, dan PP No. 50 Tahun 2015 tanggal 26 November 2016 dapat meningkatkan pemahaman penggunaan bahasa Indonesia, daerah, dan asing kepada para pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2018. *Petunjuk Teknis Pengutamaan Penggunaan Bahasa Negara di Ruang Publik*. Jakarta.

Husnan, Lalu Erwan dkk. 2017. "Pengguna bahasa Indonesia di media luar ruang dan dokumen resmi daerah di Nusa Tenggara Barat.": Laporan Penelitian Kantor Bahasa Provinsi NTB.

Indrawati, Sri. 2008. 'Penggunaan Bahasa Indonesia pada Informasi Layanan Umum dan Layanan Niaga, Sudah Benarkah?' *Kongres IX Bahasa Indonesia*: Jakarta

Kantor Bahasa Provinsi NTB. 2007. "Pemantauan Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Luar Ruang" Mataram.

Kantor Bahasa Provinsi NTB. 2008. "Pemantauan Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Luar Ruang" Mataram.

Mahsun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa: Tahap Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Noviandy. 2014. 'Persepsi masyarakat tentang Penggunaan Iklan Media Luar Ruang Terhadap Estetika Kota Samarinda.' *E-Journal Ilmu Komunikasi*. ISSN 0000-0000. fisp-unimul.ac.id.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

# Lampiran

(DESAIN)  
**KERANGKA ACUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN  
PEMANTAUAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA  
DI MEDIA LUAR RUANG DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT  
2019**

**1. Latar Belakang**

Salah satu kegiatan Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat sebagai unit kerja Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah adalah melakukan kajian penggunaan bahasa Indonesia pada media luar ruang. Kajian tersebut dimaksudkan guna melakukan tugas dan fungsi Kantor Bahasa NTB untuk mengkaji sejauh mana pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Kegiatan tersebut juga dilakukan sebagai salah satu amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Daerah yang menjadi pengamatan adalah Kabupaten Sumbawa Barat. Daerah tersebut memperlihatkan fenomena media luar ruang yang begitu beragam terutama di pusat-pusat kota di mana terdapat pusat-pusat bisnis dan perbelanjaan. Masyarakat tidak hanya disuguhkan dengan berbagai macam barang dan tempat berbelanja tetapi juga disuguhkan dengan berbagai informasi yang disampaikan melalui papan nama, reklame, spanduk, dan berbagai jenis media luar ruang lainnya. Tidak sedikit informasi yang disampaikan tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia bahkan disampaikan dalam bahasa asing dan daerah. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009, penggunaan bahasa asing ataupun bahasa daerah tidak dilarang pada penulisan papan nama, rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, reklame, dan spanduk tetapi harus mengutamakan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, penulisannya menggunakan bahasa Indonesia dan dapat diikuti oleh bahasa asing dan bahasa daerah.

Pengaturan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan lingua franca bagi berbagai etnis dengan bahasa yang berbeda di Indonesia tidak lain karena ruang publik (*public space*) bukanlah ruang privat melainkan ruang

yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan arena bagi masyarakat untuk berinteraksi (Jurgen Habermas dalam Kadarsih, 2008: 1). Ruang publik tidak membatasi siapa yang dapat mengunjunginya sehingga siapa saja dapat menikmati fasilitas umum yang ada tersebut. Ruang publik tidak memberikan akses kepada etnis tertentu, tetapi memberikan keluasaan bagi siapa saja yang mau menikmati fasilitas yang ada di sana. Ruang publik merupakan tempat interaksi yang bersifat umum. Dengan demikian, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan lingua franca bagi etnis dengan bahasa yang berbeda wajib hadir dan diutamakan karena hanya bahasa Indonesia yang secara hukum diakui dan dapat dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Ada tiga hal yang menjadi pusat perhatian pengutamaan bahasa negara di ruang publik, fisik kebahasaan meliputi kaidah kebahasaan, fisik kebahasaan dan tipografi kebahasaan. Berkaitan dengan Pemantauan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik, Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat melakukan kegiatan tersebut sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Untuk itu perlu dilakukan kajian-kajian penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang demi terwujudnya bahasa Indonesia yang bermartabat di negeri sendiri sebagaimana disebutkan di atas sesuai amanat Undang-undang.

## **2. Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana keterkendalian pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik di Kabupaten Sumbawa Barat.

### **b. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk membantu mendapatkan gambaran jenis kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang dan kategori keterkendalian pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik di Kabupaten Sumbawa Barat. Hasil penelitian tersebut dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan pengutamaan bahasa negara di ruang publik oleh pemerintah.



11	Penyerahan laporan								
12	Penggandaan laporan								

## 6. Bahan Acuan Kerja

Dalam penelitian Kajian Pemakaian Bahasa dan Apresiasi Sastra Peserta Didik Tingkat Menengah di Kabupaten Lombok Timur tahun 2017 ini, bahan yang menjadi acuan kerja antara lain

- a. UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Prosedur Operasional Standard Penelitian Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat;
- e. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Bahasa Provinsi NTB Nomor SP DIPA-023.13.2.660091/2019 revisi ke-01 tanggal 08 Februari 2019; dan
- f. Surat keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 0166/G5.21/KP/2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Kajian Pemantauan Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Luar Ruang Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 20 Februari 2019.

## 7. Tim Peneliti dan Informan

Penelitian Kajian Pemantauan Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Luar Ruang Kabupaten Sumbawa Barat ini melibatkan dua orang peneliti/pengkaji, satu orang analis data, dan sepuluh orang informan.

No	Nama	Jabatan	Instansi
1.	Siti Raudloh, M.Hum.	Koordinator	Kantor Bahasa NTB

2.	Toni Samsul Hidayat	Anggota	Kantor Bahasa NTB
3.	Safoan Abdul Hamid	Analisis data	Kantor Bahasa NTB
4.	Wim Hidayat	Informan	
5.	Denny Akbar	Informan	
6.	Ade Firmansyah	Informan	
7.	Hardoni	Informan	
8.	Lara Irawati	Informan	
9.	Rifki Ardan Rafsanji	Informan	
10.	Surya Jaya	Informan	
11.	Fahrudin Yasin	Informan	
12.	Iwan	Informan	
13.	Hasdi	Informan	

## 8. Biaya

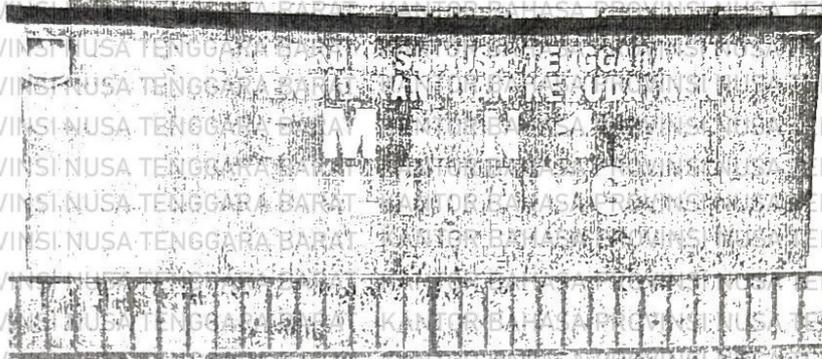
Biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penelitian ini dibebankan kepada DIPA Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat Nomor SP DIPA-023.13.2.660091/2019 revisi ke-01 tanggal 08 Februari 2019.

**PENGUTAMAAN BAHASA NEGARA DI RUANG PUBLIK**

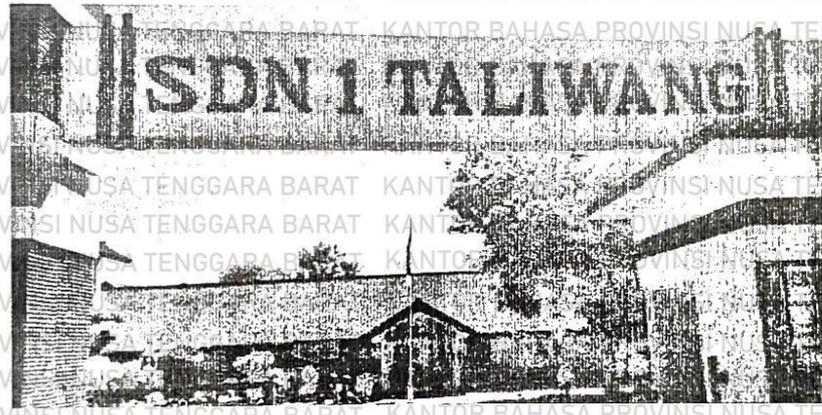
Objek	Data	Kodifikasi
1 Lembaga dan Gedung	 <b>PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT</b> <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b> <b>(BPKD)</b> Jl. Dago Mamo Komplek KTC No. 4 Tahawang Sumbawa Barat - 84355	18—KSB—01
	 <b>PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT</b> <b>KELOMPOK KESEHATAN DAERAH</b> <b>(BKD)</b> Jl. Sumbawa Karno No. 10 Komplek KTC Taliwari Telp. (0372) 81724	18—KSB—02
	 <b>DINAS KESEHATAN</b>	18—KSB—03
		18—KSB—04



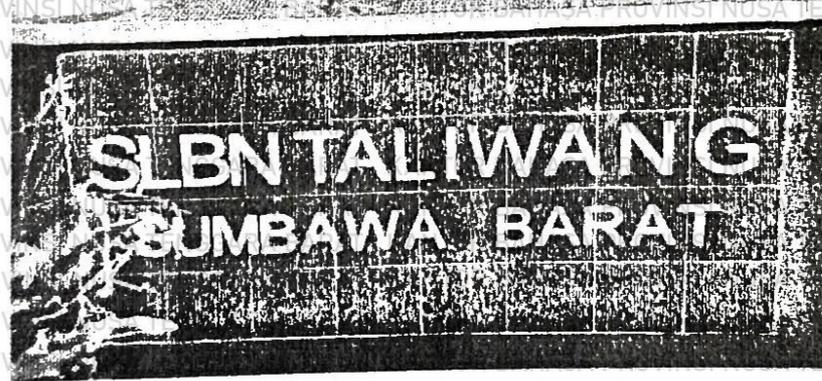
18-KSB-05



18-KSB-06



18-KSB-07



18-KSB-08



18-KSB-09



18-KSB-10

Sarana Umum



18-KSB-11



18-KSB-12



18-KSB-13



18-KSB-14



18-KSB-15



18-KSB-16



# PT. LAYANAN TEKNIK

Jl. Sultan Sahrir - Taliwang | Telp. 0372 81070

18-KSB-17



# PT. BANGUNAN

18-KSB-18

## SEKRETARIAT UNIVERSITAS

### & HUBUNGAN KERJASAMA

# KSB INDONESIA



18-KSB-19



# PT. ENJOY

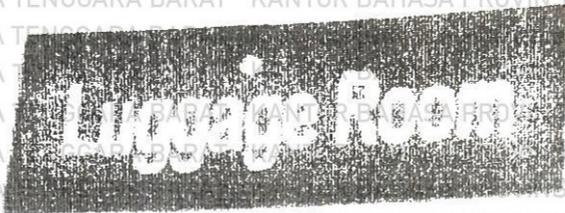


18-KSB-20

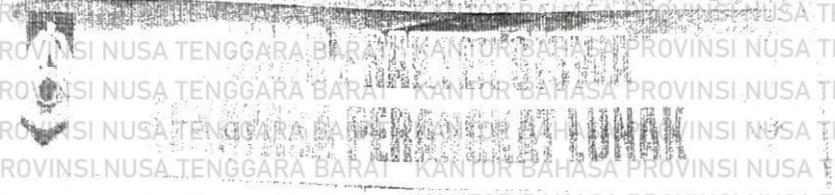
3. Ruang  
Pertemuan



18-KSB-21



18-KSB-22



18-KSB-23



18-KSB-24



18-KSB-25

**RUANG MUSEUM**

18-KSB-26



18-KSB-28



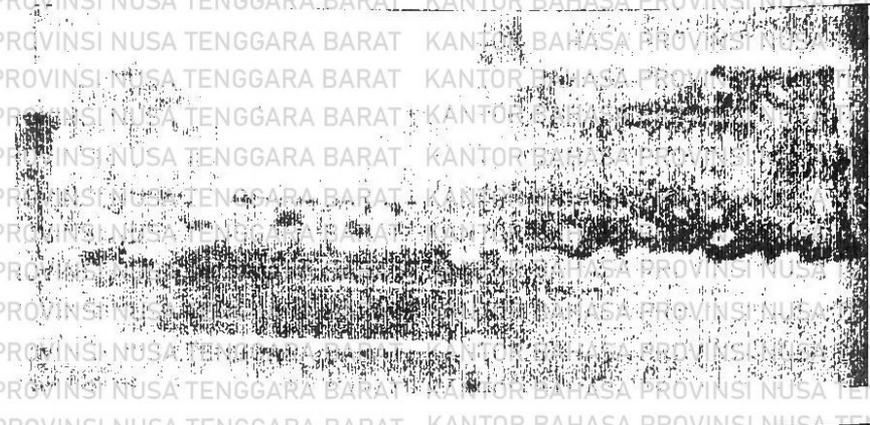
18-KSB-29

**RUANG PRATIKSISWA  
DESAKAWA PERKODULAN DAN INFORMASI BANGUNAN - 01**

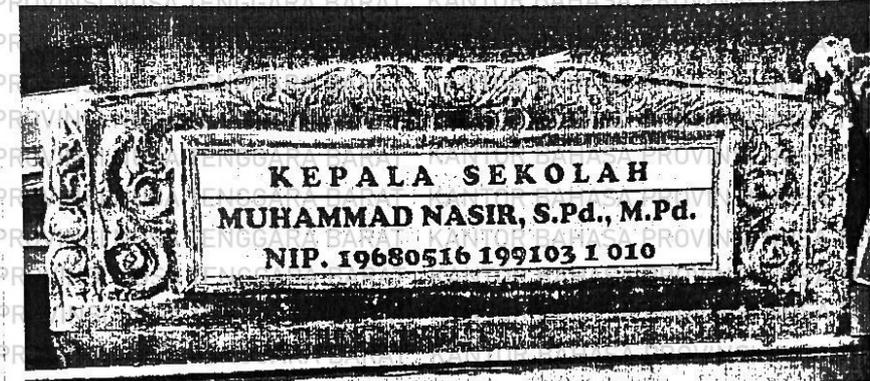
18-KSB-30



Nama                     



18-KSB-31



18-KSB-32



18-KSB-33

**KA SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

18-KSB-34

NUSA TENGGARA BARAT

NUSA TENGGARA BARAT

**Suliman, SKM**  
**NIP. 197212111993031003**

NUSA TENGGARA BARAT

18-KSB-35

**KEPALA DINAS**

18-KSB-36

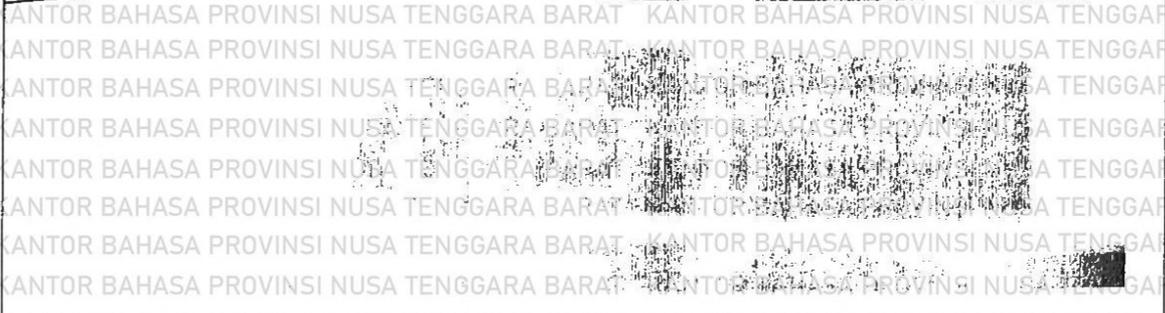
**FI. TUWUH, S. AP**  
**NIP. 19640507198511003**

18-KSB-37

18-KSB-38



18-KSB-39



18-KSB-40

5.  
Bara / a



18-KSB-41



18-KSB-42



18-KSB-43



18-KSB-44



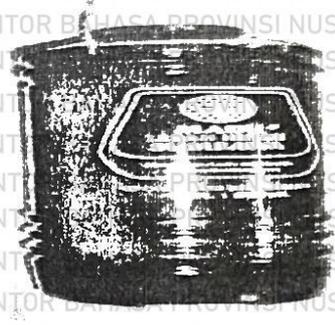
18-KSB-45



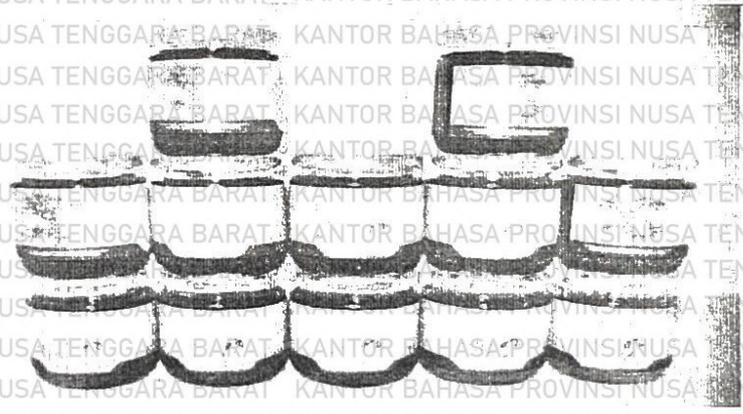
18-KSB-46



18-KSB-47



18-KSB-48



18-KSB-49



**1 PELANGGAN 1 MESIN**

18-KSB-50

**PAKAIAN, GORDEN,  
BONEKA, BED COVER  
KARPET**

**JUAL PARFUM & PELICIN**

LINGK. SEMOAN, KEL. KUANG - TALIWANG - KSB  
**30 M**

6. atau



18-KSB-51

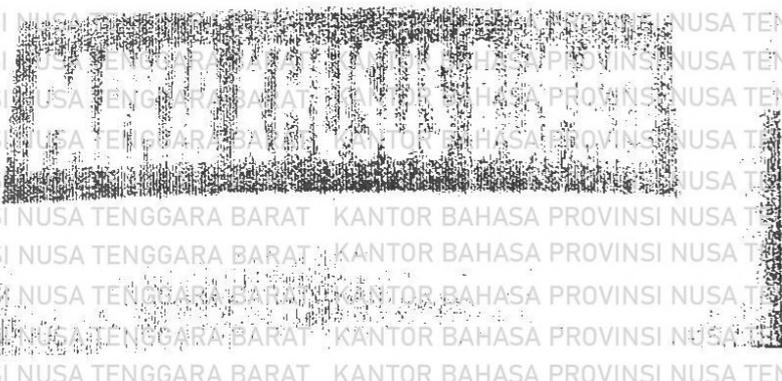


**KAWAGAN  
NPA RO**

18-KSB-52

(UU KESEHATAN NO. 35 TAHUN 2009)  
DAI JUN 20

**TERIMA KASIH UNTUK TIDAKSA PULIH**



18-KSB-53

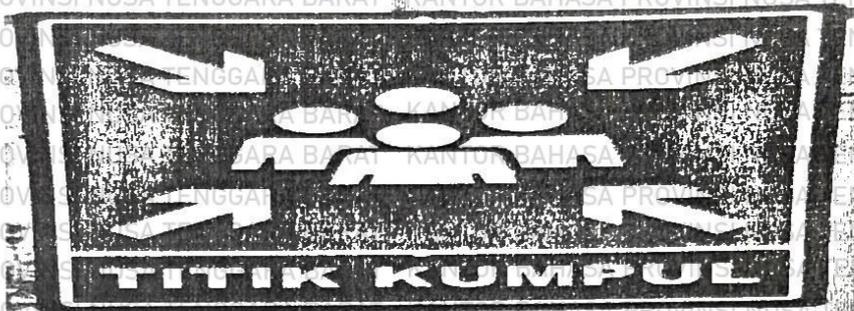




18-KSB-58



18-KSB-59



18-KSB-60



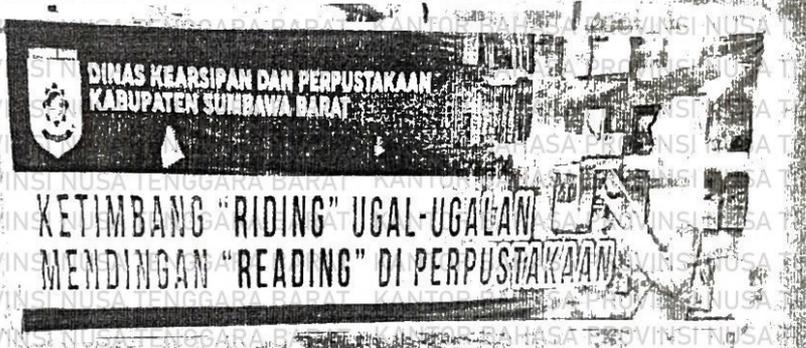
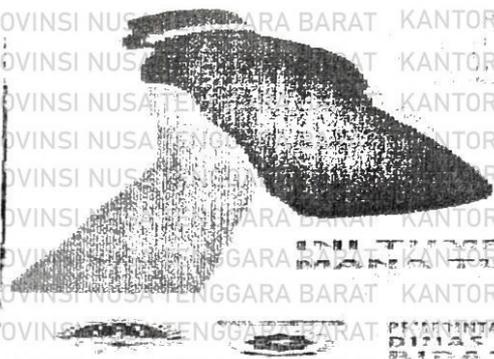
18-KSB-61



18-KSB-62

# KENDALIKAN RIDE UGAL-UGALAN

18-KSB-63



18-KSB-64



18-KSB-65



18-KSB-66



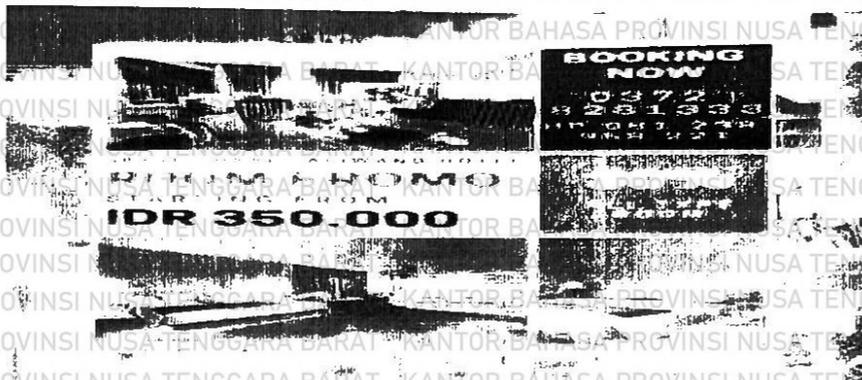
18-KSB-67



18-KSB-68



18-KSB-69



18-KSB-70

**INSTRUMEN PENILAIAN WILAYAH KETERKENDALIAN**

Jumlah 1906 Tingkat Terkendali C

No.	Nama Wilayah	Kode Data	Kaidah Kebahasaan (30%)			Nilai KR x Bobot	Fisik Kebahasaan (50%)			Nilai FR x Bobot	Tipografi Kebahasaan (20%)			Nilai TK x Bobot	Jumlah
			Ejaan	Pilihan Kata	Struktur		Posisi (60%)	Nilai x Bobot	Ukuran Huruf (20%)		Nilai x Bobot	Warna Huruf (20%)	Nilai x Bobot		
1		30	30	30	30	9.0	18.0	30	6.0	6.0	30	30	30	6.0	30.0
2		18-KSB-02	20	30	30	8.0	18.0	30	6.0	6.0	30	30	30	6.0	29.0
3		18-KSB-03	30	30	30	9.0	18.0	30	6.0	6.0	30	30	30	6.0	30.0
4		18-KSB-04	30	30	30	9.0	18.0	30	6.0	6.0	30	30	30	6.0	30.0
5		18-KSB-05	30	30	30	9.0	18.0	30	6.0	6.0	30	30	30	6.0	30.0
6		18-KSB-06	30	30	30	9.0	18.0	30	6.0	6.0	30	30	30	6.0	30.0
7		18-KSB-07	30	30	30	9.0	18.0	30	6.0	6.0	30	20	30	5.3	29.3
8		18-KSB-08	30	30	30	9.0	18.0	30	6.0	6.0	30	20	30	5.3	29.3
9		18-KSB-09	30	30	30	9.0	18.0	30	6.0	6.0	30	30	30	6.0	30.0
10		18-KSB-10	20	30	30	8.0	18.0	30	6.0	6.0	30	30	30	6.0	29.0
11		18-KSB-11	30	30	30	9.0	18.0	30	6.0	6.0	30	30	30	6.0	30.0
12		18-KSB-12	30	30	30	9.0	18.0	30	6.0	6.0	20	20	30	4.7	28.7
13		18-KSB-13	20	30	30	8.0	18.0	30	6.0	6.0	20	20	30	4.7	27.7
14		18-KSB-14	30	30	30	9.0	18.0	30	6.0	6.0	20	20	30	4.7	28.7
15		18-KSB-15	30	30	30	9.0	18.0	30	6.0	6.0	30	30	30	6.0	30.0
16		18-KSB-16	30	30	30	9.0	18.0	30	6.0	6.0	20	20	30	4.7	28.7
17		18-KSB-17	30	30	30	9.0	18.0	30	6.0	6.0	20	20	30	5.3	29.3
18		18-KSB-18	30	30	30	9.0	12.0	30	6.0	20	30	30	30	6.0	26.0
19		18-KSB-19	20	30	30	8.0	18.0	30	6.0	30	30	30	30	6.0	29.0
20		18-KSB-20	30	30	30	9.0	18.0	30	6.0	6.0	30	30	30	6.0	30.0
21		18-KSB-21	30	30	30	9.0	18.0	30	6.0	6.0	30	30	30	6.0	30.0
22		18-KSB-22	20	10	10	4.0	6.0	20	4.0	20	30	20	30	5.3	16.3
23		18-KSB-23	20	30	30	8.0	18.0	30	6.0	30	20	20	30	4.7	27.7
24		18-KSB-24	30	30	30	9.0	18.0	30	6.0	30	30	20	30	5.3	29.3
25		18-KSB-25	30	30	30	9.0	18.0	30	6.0	30	20	20	30	4.7	28.7
26		18-KSB-26	30	30	30	9.0	18.0	30	6.0	30	20	20	30	4.7	28.7
27		18-KSB-27	30	30	30	9.0	18.0	30	6.0	30	30	30	30	6.0	30.0
28		18-KSB-28	30	30	30	9.0	18.0	30	6.0	30	20	20	30	4.7	28.7
29		18-KSB-29	30	30	30	9.0	18.0	30	6.0	30	30	30	30	6.0	30.0
30		18-KSB-30	20	30	30	8.0	18.0	30	6.0	20	20	30	30	4.7	27.7
31		18-KSB-31	20	30	30	8.0	18.0	30	6.0	30	30	30	30	6.0	29.0
32		18-KSB-32	20	30	30	8.0	18.0	30	6.0	30	30	30	30	6.0	29.0

33	18-KSB-33	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	6.0	30.0
34	18-KSB-34	20	30	8.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	20	30	4.0	27.0
35	18-KSB-35	20	30	8.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	20	30	4.0	27.0
36	18-KSB-36	20	30	8.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	20	30	4.0	27.0
37	18-KSB-37	20	30	8.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	20	30	4.0	27.0
38	18-KSB-38	20	30	8.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	20	30	4.0	27.0
39	18-KSB-39	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	6.0	30.0
40	18-KSB-40	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	6.0	30.0
41	18-KSB-41	20	30	8.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	20	30	5.3	28.3
42	18-KSB-42	20	30	8.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	20	30	4.7	27.7
43	18-KSB-43	20	30	7.0	10	6.0	20	4.0	10	2.0	6.0	20	30	5.3	18.3
44	18-KSB-44	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	20	30	5.3	29.3
45	18-KSB-45	20	30	8.0	20	12.0	30	6.0	20	4.0	11.0	30	30	6.0	25.0
46	18-KSB-46	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	20	30	5.3	29.3
47	18-KSB-47	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	5.3	29.3
48	18-KSB-48	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	5.3	29.3
49	18-KSB-49	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	6.0	30.0
50	18-KSB-50	20	10	5.0	20	12.0	10	2.0	20	4.0	9.0	20	30	5.3	19.3
51	18-KSB-51	10	10	3.0	10	6.0	30	6.0	10	2.0	7.0	20	30	5.3	15.3
52	18-KSB-52	30	30	9.0	10	6.0	30	6.0	30	6.0	9.0	30	30	6.0	24.0
53	18-KSB-53	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	20	30	5.3	29.3
54	18-KSB-54	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	20	30	5.3	29.3
55	18-KSB-55	30	20	6.0	10	6.0	10	4.0	20	4.0	7.0	10	20	4.0	17.0
56	18-KSB-56	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	6.0	30.0
57	18-KSB-57	30	30	9.0	20	12.0	30	6.0	30	6.0	12.0	30	30	6.0	27.0
58	18-KSB-58	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	6.0	30.0
59	18-KSB-59	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	6.0	30.0
60	18-KSB-60	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	20	30	5.3	29.3
61	18-KSB-61	20	20	6.0	20	12.0	30	6.0	30	6.0	12.0	20	30	5.3	23.3
62	18-KSB-62	20	30	8.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	20	30	5.3	28.3
63	18-KSB-63	20	20	6.0	20	12.0	30	6.0	30	6.0	12.0	20	30	5.3	23.3
64	18-KSB-64	10	10	3.0	20	12.0	20	4.0	10	2.0	9.0	20	30	5.3	17.3
65	18-KSB-65	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	6.0	30.0
66	18-KSB-66	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	6.0	30.0
67	18-KSB-67	20	20	5.0	20	12.0	20	4.0	10	2.0	9.0	20	30	5.3	19.3
68	18-KSB-68	20	20	6.0	20	12.0	10	2.0	20	4.0	9.0	20	30	5.3	20.3
69	18-KSB-69	20	30	8.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	6.0	29.0
70	18-KSB-70	10	10	3.0	10	6.0	10	2.0	10	2.0	5.0	20	30	5.3	13.3
71				0.0		0.0		0.0		0.0	0.0			0.0	0.0
72				0.0		0.0		0.0		0.0	0.0			0.0	0.0

